

PENGUNAAN ETIKA KOMUNIKASI SYARIAH PADA DINAMIKA KEBEBASAN PERS DALAM MENYAMPAIKAN KRITIK

¹Fathan Dae Chani, ²Firman Yassir Al amin

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: Fathan13dae@gmail.com, firmanyasir506@gmail.com.

Abstract

Press freedom is a fundamental pillar of democracy; however, in the context of Indonesia's Muslim-majority society, it often intersects with social norms and Sharia ethical principles. This study aims to explore how Sharia communication ethics can be applied in journalistic practices, particularly in the expression of criticism, and how it affects public perception and media credibility. A qualitative method was employed using library research, with data collected from scholarly journals, books, and legal documents. The analysis was conducted thematically based on core Islamic communication values such as *tabayyun* (verification), *amanah* (accountability), and *hikmah* (wisdom). The findings indicate that the application of these principles enhances public trust and media credibility, while their neglect leads to biased reporting, trust erosion, and diminished media function as a democratic institution. In conclusion, integrating Sharia-based ethics into journalism is not only normatively and religiously important but also strategic for cultivating ethical journalism that is constructive and contributes to social cohesion amid modern societal complexities.

Keywords: Sharia communication ethics, press freedom, media credibility, constructive criticism, Islamic journalism.

Abstrak

Kebebasan pers merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi, namun dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, kebebasan ini sering bersinggungan dengan norma sosial dan prinsip etika syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika komunikasi syariah dapat diterapkan dalam praktik jurnalistik, terutama dalam menyampaikan kritik, serta dampaknya terhadap persepsi publik dan kredibilitas media. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik berdasarkan nilai-nilai utama dalam etika komunikasi syariah seperti *tabayyun* (verifikasi), *amanah* (tanggung jawab), dan *hikmah* (kebijaksanaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas media, sedangkan pengabaian terhadapnya menyebabkan bias informasi, erosi kepercayaan, dan menurunnya fungsi media sebagai institusi demokratis. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik jurnalistik tidak hanya penting secara normatif dan religius, tetapi juga strategis dalam membangun jurnalisme etis yang konstruktif dan menjaga kohesi sosial di tengah kompleksitas masyarakat modern.

Kata Kunci: Etika komunikasi syariah, kebebasan pers, kredibilitas media, kritik konstruktif, jurnalisme Islami.

PENDAHULUAN

Konsep kebebasan pers merupakan pilar fundamental dan esensial yang menopang fungsi dan vitalitas masyarakat demokratis kontemporer. Dalam kasus Indonesia, kerangka hukum yang melindungi hak untuk mengungkapkan pendapat dan kritik yang berbeda melalui berbagai saluran media diabadikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang secara khusus berkaitan dengan Pers. Namun demikian, sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam aplikasi praktis, kebebasan yang seolah-olah tidak terbatas ini sering menghadapi tantangan dan konflik yang signifikan dengan berbagai batasan moral, norma-norma sosial yang berlaku, dan, dalam kasus tertentu, keyakinan agama. Ketika tindakan kritik menyimpang dari standar etika, ia memiliki potensi untuk berubah menjadi pernyataan fitnah atau pernyataan provokatif, dengan demikian merusak esensi dan tujuan pers yang dimaksudkan, yaitu berfungsi sebagai saluran kebenaran dan agen perubahan sosial transformatif.

Dalam konteks spesifik masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim, syariah Islam muncul tidak semata-mata sebagai kerangka spiritual tetapi juga berfungsi sebagai titik referensi kritis dalam evaluasi kebenaran dan kesalahan moral, terutama dalam ranah komunikasi publik. Etika komunikasi sebagaimana didikte oleh syariah menekankan beberapa prinsip dasar, termasuk tabayyun, yang berkaitan dengan verifikasi informasi, dan amar ma'ruf nahi munkar, yang menganjurkan promosi kebaikan dan pencegahan kejahatan, di samping keharusan untuk menjaga martabat dan kehormatan individu ketika menyebarkan informasi. Fokus yang jelas pada kejujuran, akuntabilitas, dan niat baik dalam artikulasi kritik menjadi sangat menonjol dalam mengatasi berbagai eksese dan pelanggaran etika yang mungkin timbul dalam bidang kebebasan pers (Wiranata et al., 2023).

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak jurnalis menemukan diri mereka terjebak dalam dilema yang kompleks, terjebak antara keharusan menjalankan kebebasan mereka untuk menyuarakan kritik dan tekanan yang meningkat yang diberikan oleh kepentingan ekonomi dan politik yang sering mendominasi lanskap media. Situasi genting ini menghasilkan perbedaan yang jelas dalam independensi jurnalistik, yang pada gilirannya berdampak buruk baik pada akurasi dan standar etika pelaporan berita, seperti dicatat oleh (Mustofa, 2014). Dalam keadaan seperti itu, adopsi dan penerapan etika komunikasi syariah dapat mewakili alternatif yang layak dan integratif yang memiliki potensi untuk menyelaraskan domain kebebasan pers dan akuntabilitas moral yang sering saling bertentangan.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penting yang sangat relevan dengan kondisi komunikasi publik saat ini. Pertama, *bagaimana bentuk penerapan etika komunikasi syariah dalam praktik jurnalistik saat menyampaikan kritik?* Pertanyaan ini muncul dari keprihatinan akan maraknya penyampaian kritik yang, alih-alih konstruktif, justru menimbulkan disinformasi atau memperkeruh suasana publik.

Pertanyaan kedua yang menjadi fokus adalah: *apa dampak penerapan atau pengabaian etika syariah terhadap persepsi publik terhadap media dan kredibilitas pers?* Ini penting karena kepercayaan publik adalah modal utama bagi media untuk bisa bertahan dan berpengaruh. Ketika media konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menyampaikan kritik—dengan tidak menyinggung, memfitnah, atau menyebarkan prasangka—maka ia tidak hanya dipercaya, tetapi juga dihormati. Sebaliknya, pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut berisiko membuat media

dicap bias, provokatif, atau bahkan kehilangan legitimasinya sebagai pilar demokrasi.

Urgensi penelitian ini digarisbawahi oleh meningkatnya polarisasi sosial yang telah diperburuk oleh proliferasi pendapat dan kritik yang tidak konstruktif yang beredar di saluran media. Prinsip-prinsip etika syariah dalam komunikasi publik menawarkan kerangka kerja yang mampu memberikan seperangkat standar yang lebih humanistik, adil, dan inklusif untuk praktik jurnalistik. Sangat penting untuk menyadari bahwa wartawan, dalam peran mereka sebagai pemasok kebenaran, tidak hanya memenuhi kewajiban profesional tetapi juga melakukan tanggung jawab moral yang mirip dengan da'i, atau pemandu agama, dengan memberikan kepada publik informasi yang tidak hanya jujur tetapi juga bermanfaat dan konstruktif. (Thaib, 2014)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki cara-cara di mana sila etika komunikasi syariah dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam praktik kebebasan pers, terutama ketika menyangkut ekspresi kritik yang ditujukan kepada otoritas atau masyarakat yang lebih luas. Menggunakan metodologi kualitatif yang mencakup tinjauan literatur dan analisis konten, penelitian ini berusaha untuk menerangi kemungkinan untuk mencapai koeksistensi yang harmonis antara nilai-nilai yang melekat dalam syariah dan prinsip dasar kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan jurnalisme kontemporer.

Oleh karena itu, artikel ini untuk berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap perkembangan jurnalisme etika yang berkelanjutan dalam konteks Indonesia. Penggabungan etika syariah ke dalam kerangka jurnalisme memiliki janji yang signifikan untuk menghasilkan model komunikasi kritis yang seimbang, berorientasi pada solusi, dan bermartabat. Upaya tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperkuat integritas profesi jurnalistik tetapi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas sosial dalam masyarakat yang dicirikan oleh kompleksitas dan keragaman agama (Hendra, 2021). Manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini mencakup tidak hanya kemajuan teoritis untuk bidang studi tetapi juga implikasi praktis bagi investor, operator bisnis, dan badan pengatur yang menavigasi lanskap rumit ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip etika komunikasi syariah diterapkan dalam konteks kebebasan pers, khususnya dalam menyampaikan kritik. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema komunikasi Islami dan praktik jurnalistik. Peneliti menggunakan panduan analisis isi yang disusun berdasarkan nilai-nilai utama dalam komunikasi syariah, seperti tabayyun (verifikasi informasi), amanah (tanggung jawab dalam menyampaikan pesan), dan adab (kesantunan dalam kritik). Proses penelitian dimulai dengan menyeleksi sumber-sumber terpercaya, membaca dan mencatat secara cermat, lalu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari literatur. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik, dengan tujuan menemukan pola makna, nilai moral, dan ketegangan antara idealisme etika syariah dan praktik kebebasan pers di lapangan. Untuk memastikan temuan yang diperoleh tidak bias, peneliti melakukan triangulasi sumber

dan mendiskusikan hasilnya dengan rekan sejawat agar interpretasinya tetap seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penerapan Etika Komunikasi Syariah dalam Praktik Jurnalistik Saat Menyampaikan Kritik

Prinsip-prinsip etika komunikasi Syariah di ranah praktik jurnalistik tidak dapat disangkal sangat penting dalam menegakkan integritas dan martabat yang terkait dengan penyebaran informasi, terutama dalam kasus di mana jurnalis terlibat dalam analisis kritis kebijakan publik atau meneliti perilaku dan tindakan elit sosial. Dalam kerangka Islam, komunikasi melampaui tindakan menyampaikan pesan belaka; itu berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memastikan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasar seperti *ṣidq* (kejujuran), *amānah* (tanggung jawab), dan *ḥikmah* (kebijaksanaan) merupakan dasar-dasar esensial yang harus membimbing setiap upaya jurnalistik, dengan demikian memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip hukum Syariah. Hadis yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, yang memberikan instruksi kepada umat untuk berbicara dengan baik atau tetap diam, memberikan dasar penting bagi pers Muslim karena menjalankan tanggung jawab profesionalnya (Wiranata et al., 2023)

Dalam konteks khusus menyampaikan kritik konstruktif, prinsip-prinsip yang disebutkan di atas mengharuskan jurnalis terlibat dengan cara yang adil dan proporsional dalam penilaian mereka. Sangat penting bahwa kritik diartikulasikan bukan dengan maksud untuk memfitnah atau memicu kontroversi, tetapi untuk menawarkan wawasan konstruktif yang dapat diselesaikan dan bermanfaat. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi semacam itu harus tetap hormat dan konstruktif, menghindari provokasi atau serangan pribadi. Konsep “komunikasih” seperti yang dikembangkan oleh (Wijaya, 2015) muncul sebagai model yang relevan, menganjurkan bentuk komunikasi empatik yang menyelimuti pesan dalam kasih sayang dan niat baik. Melalui penerapan pendekatan ini, wartawan dapat secara efektif mengartikulasikan kebenaran sekaligus meminimalkan kemungkinan konflik dan kesalahpahaman yang mungkin timbul selama proses komunikasi.

Di luar pertimbangan sikap dan pilihan linguistik, aspek kritis verifikasi informasi muncul sebagai elemen penting yang fundamental dalam kerangka etika komunikasi Syariah. Ajaran Islam menggarisbawahi pentingnya prinsip *tabayyun*, yang mengamanatkan pemeriksaan menyeluruh dan verifikasi kebenaran informasi sebelum pengirimannya. Dalam konteks praktik jurnalistik, ini menentukan bahwa jurnalis harus bergantung pada sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, menahan diri dari penyebaran informasi yang tergesa-gesa yang belum diverifikasi secara memadai. Pengabaian *tabayyun* dapat menyebabkan risiko besar menyebarkan tipuan dan fitnah, yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah tetapi juga sangat mengikis kepercayaan publik terhadap media (Wiranata et al., 2023).

Selain itu, peran jurnalis dalam paradigma Islam melampaui transmisi berita belaka; mereka dikonseptualisasikan sebagai pemasok kebenaran atau *da'i*, yang diterjemahkan menjadi peran utusan untuk kebenaran dan pencerahan. Perspektif ini mengangkat profesi jurnalisisme ke jalur khotbah yang mulia yang harus dinavigasi dengan integritas maksimal, melampaui

pengejaran eksklusivitas belaka dalam pelaporan berita. Tanggung jawab otentik wartawan mencerminkan tugas kenabian untuk memberikan kepercayaan dengan keadilan dan ketidakberpihakan, dengan demikian menerangi masyarakat dengan kebenaran. Akibatnya, wartawan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kebijaksanaan dalam keterlibatan kritis mereka dapat dianggap sebagai fasilitator nilai-nilai yang melekat dalam dakwah Islam (Thaib, 2014)

Namun demikian, penting untuk mengakui bahwa dalam praktiknya, tidak semua media atau jurnalis mematuhi prinsip-prinsip etika pedoman ini. Sejumlah besar organisasi media mengeksploitasi gagasan kebebasan pers untuk menyebarkan kritik yang sarat dengan kebencian, menggunakan serangan *ad hominem*, atau bahkan membelok ke arah sentimen radikal. Tren yang mengganggu ini sering muncul dari kurangnya kesadaran spiritual dalam ranah praktik jurnalistik. Kritik yang disajikan semakin dianggap bukan sebagai bentuk reparasi yang konstruktif, melainkan sebagai instrumen propaganda atau mekanisme tekanan politik. Dalam kasus ekstrim, media yang seolah-olah berdedikasi pada dakwah dapat beralih ke medan pertempuran konfrontasi, didorong oleh fanatisme yang bersemangat yang mengabaikan etika dakwah Islam itu sendiri (Prayogi & Tohari, 2022).

Oleh karena itu, penerapan etika komunikasi syariah harus menjadi kerangka dasar untuk membentuk lanskap kebebasan pers di Indonesia. Dengan mendorong internalisasi nilai-nilai Syariah, wartawan memiliki kesempatan untuk muncul sebagai agen perubahan transformatif, yang tidak hanya terlibat secara kritis dengan isu-isu sosial tetapi juga berkontribusi pada pengasuhan, pencerahan, dan kesatuan umat. Sangat penting untuk menyadari bahwa kritik tajam tidak perlu identik dengan kekerasan, dan bahwa kebebasan berekspresi tidak sama dengan pengabaian yang sembrono. Sebaliknya, integrasi harmonis praktik jurnalistik profesional dan kesadaran yang tinggi akan prinsip-prinsip Syariah akan berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap media Islam, memposisikan pers sebagai bagian integral dari solusi, bukan sumber perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat (zakaria, 2023).

2. Dampak Penerapan atau Pengabaian Etika Syariah Terhadap Persepsi Publik Pada Media dan Kredibilitas Pers

Implementasi atau kurangnya standar etika Syariah dalam ranah media massa memberikan pengaruh besar pada persepsi publik serta kredibilitas pers yang dirasakan, yang merupakan komponen penting dari setiap masyarakat demokratis. Etika Syariah, yang berakar kuat pada nilai-nilai inti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, memiliki peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik di lembaga media, sehingga memperkuat gagasan bahwa media seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk penyebaran informasi tetapi juga harus bertindak sebagai penjaga integritas moral dan nilai-nilai sosial yang tinggi (Swahadini et al., 2024). Ketika prinsip-prinsip etika ini secara konsisten dan rajin dipatuhi, media mengumpulkan rasa hormat dan kepercayaan dari publik; Namun, ketika ada pengabaian terang-terangan terhadap prinsip-prinsip Syariah tersebut, hal itu dapat menyebabkan erosi kepercayaan yang signifikan di antara masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan umum dalam kredibilitas pers secara keseluruhan.

Sejumlah penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa kredibilitas outlet media cenderung meningkat ketika konten berita disampaikan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, selaras dengan maqashid Syariah, yang menekankan tujuan hukum Islam. Kepatuhan terhadap standar etika ini memperkuat kedudukan media sebagai lembaga yang ditandai dengan integritas tinggi, terutama di dalam komunitas Muslim di mana nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi.

Sebaliknya, ketika media memilih untuk mengabaikan pedoman etika Syariah, itu menghasilkan distorsi yang signifikan terhadap nilai-nilai dan norma masyarakat, akibatnya mengarah pada erosi bertahap kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini. (Arisandy, 2023) menyoroti bahwa manipulasi informasi, keberpihakan yang meluas, dan pengabaian topik sensitif yang memerlukan diskusi yang adil berfungsi sebagai katalis utama untuk meningkatnya ketidakpercayaan terhadap outlet media lokal di daerah di mana nilai-nilai agama adalah yang terpenting. Fenomena ini melampaui etika jurnalistik belaka; ia menimbulkan ancaman serius bagi kohesi struktur sosial dan arus informasi yang teratur dalam masyarakat.

Dari perspektif Syariah, kredibilitas pers dinilai tidak hanya berdasarkan akurasi faktual informasi yang disajikan tetapi juga melalui kompas moral wartawan dan niat yang mendasari organisasi media. Penelitian yang dilakukan oleh (Kumarudin, 2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor internal, seperti independensi proses editorial dan komitmen outlet media untuk melayani kepentingan publik, secara signifikan membentuk persepsi publik. Jika, misalnya, media menjadi terlalu dipengaruhi oleh agenda politik atau ekonomi, ada risiko yang cukup besar bahwa nilai-nilai Syariah akan diturunkan ke latar belakang, membuat publik memandang media sebagai tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.

Selain itu, penerapan etika syariah membawa implikasi substansial bagi regulasi media dan perumusan kebijakan. Sebuah studi oleh (Nurani, 2024) mengartikulasikan bahwa perlindungan hak, termasuk hak atas akuntabilitas dan hak untuk menolak publikasi, sebagaimana diabadikan dalam UU Pers No. 40 tahun 1999, selaras dengan prinsip-prinsip Syariah yang memprioritaskan keadilan dan martabat individu. Ketika prinsip-prinsip dasar ini diabaikan, itu menciptakan pelanggaran signifikan yang merusak posisi media di mata publik. Akibatnya, menumbuhkan sinergi antara kerangka peraturan nasional dan standar etika Syariah sangat penting untuk mempertahankan integritas dan moral pers.

Singkatnya, penggabungan nilai-nilai Syariah ke dalam praktik jurnalistik berfungsi sebagai landasan penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas media dalam masyarakat. Pengabaian prinsip-prinsip etika ini tidak hanya menodai reputasi lembaga media tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi berfungsinya demokrasi informasi yang sehat. Outlet media yang setia mematuhi etika Syariah diposisikan untuk menyampaikan konten yang adil dan konstruktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang beradab dan berpengetahuan luas di mana individu diberdayakan melalui penyebaran informasi yang akurat dan etis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi etika komunikasi syariah dalam praktik jurnalistik, khususnya dalam penyampaian kritik, bukan hanya merupakan kebutuhan normatif, melainkan juga keniscayaan strategis untuk mempertahankan kredibilitas media di tengah masyarakat yang kompleks secara sosial dan religius. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, prinsip-prinsip syariah seperti *tabayyun*, *amanah*, dan *hikmah* memberikan kerangka kerja moral yang kuat untuk menilai dan membentuk perilaku pers yang bertanggung jawab. Ketika etika syariah diterapkan, media dipandang tidak sekadar sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai institusi moral yang menjunjung tinggi keadilan dan kehormatan manusia. Sebaliknya, pengabaian terhadap etika ini memicu kemerosotan kepercayaan publik, memunculkan persepsi bias, dan pada akhirnya mengancam fungsi media sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini juga mengungkap bahwa jurnalis idealnya diposisikan tidak hanya sebagai profesional berita, tetapi juga sebagai agen dakwah dan edukasi yang mampu menyampaikan kritik secara konstruktif, beretika, dan solutif. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulasi formal, kesadaran spiritual, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan penting dalam membentuk praktik kebebasan pers yang bermartabat, inklusif, dan berdampak positif terhadap stabilitas sosial serta kualitas demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

1. Arisandy, D. P. (2023). Realitas Media Massa Lokal dan Politik Dalam Proses Demokrasi di Kota Langsa (The Reality of Local Mass Media and Politics in the Democratic Process in Langsa City). *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 14(2), 189–204.
2. Hendra, T. (2021). ETIKA KOMUNIKASI DALAM BERDAKWAH. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 15(1).
3. Kumarudin. (2021). *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*. UIN Syarif Hidayatullah.
4. Mustofa, A. (2014). *Struktur Dominasi Media Pada Independensi Wartawan*. Universitas Diponegoro Semarang.
5. Nurani, N. (2024). Nurani, N. (2024). Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur .
6. Prayogi, B., & Tohari, A. (2022). Komunikasi politik Kelompok Radikal pada Portal Media Voaislam.com dan Arrahmah.com Perspektif Harold. D Lasswel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2).
7. Swahadini, Q. R., Faoziyah, S., Ma'mun, S., & Khotimah, N. (2024). NILAI-NILAI ISLAM DALAM MENJAGA ETIKA JURNALISTIK DI MEDIA MUSLIM: STUDI SUARA ISLAM. ID (SI ONLINE). *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 354–367.
8. Thaib, E. J. (2014). Wartawan Sebagai Da'i. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 147–158.
9. Wijaya, B. S. (2015). KOMUNIKASIH: Komunikasi positif Berbasis Empati. *Journal Communication Spectrum*, 5(2), 147–166.
10. Wiranata, S., Riziq Dhofin, A., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2023). ETIKA KOMUNIKASI MUSLIM DALAM BERMEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HADITS. *Journal Of Islamic Communication*, 4(2). <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/joiscom>
11. zakaria, M. Z. (2023). AMALAN ETIKA DAN BUDAYA INTEGRITI DALAM KALANGAN PENGAWAI PENYIASAT DI JABATAN SIASATAN JENAYAH POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM). *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 29, 192–210.